



PANDANGAN UMUM

FRAKSI AMANAT RESTORASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

TERHADAP

**NOTA PENGANTAR BUPATI
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2025**

**FRAKSI AMANAT RESTORASI
DPRD KABUPATEN KUNINGAN
2026**



DPRD KABUPATEN KUNINGAN
FRAKSI AMANAT RESTORASI
JL. R.E. Martadinata, Ancaran, Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan – Jawa Barat 45514



PANDANGAN UMUM
FRAKSI AMANAT RESTORASI
DPRD KABUPATEN KUNINGAN

TERHADAP

NOTA PENGANTAR BUPATI
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2025

**YANG KAMI HORMATI SAUDARAKU KAKAK PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN KUNINGAN.**

**YANG KAMI HORMATI SAUDARAKU KAKAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUNINGAN.**

**YANG KAMI HORMATI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN.**

**YANG KAMI HORMATI SAUDARAKU KAKAK KETUA PENGADILAN NEGERI
DAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN.**

**YANG KAMI HORMATI SAUDARAKU KAKAK KETUA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN KUNINGAN.**

**YANG KAMI HORMATI SAUDARAKU KAKAK SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN.**

**YANG KAMI HORMATI PARA ASISTEN PEMERINTAH DAERAH, STAF AHLI,
KEPALA DINAS, BADAN, LEMBAGA DAN BAGIAN DI LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.**

**PARA CAMAT DAN HADIRIN TAMU UNDANGAN SERTA INSAN PERS YANG
BERBAHAGIA.**

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

“SALAM AMANAT RESTORASI”

MENGAWALI PANDANGAN UMUM INI, MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT, TAUFIK, DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT. SHALAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT, HINGGA KEPADA KITA SELAKU UMATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

FRAKSI AMANAT RESTORASI MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN ATAS PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 TEPAT WAKTU, SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN INI BUKAN SEKADAR RUTINITAS ADMINISTRATIF ATAU FORMALITAS KONSTITUSIONAL SEMATA, MELAINKAN INSTRUMEN PENTING UNTUK MENGUKUR SEJAUH MANA ASAS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI ANGGARAN TELAH DIIMPLEMENTASIKAN DEMI KEMASLAHATAN SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN.

PADA MOMENTUM YANG BERBAHAGIA INI, FRAKSI AMANAT RESTORASI MENYAMPAIKAN SECARA KHUSUS UCAPAN SELAMAT DAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN BESERTA SELURUH JAJARAN ATAS DIRAIHNYA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN ANGGARAN 2025. CAPAIAN INI MERUPAKAN LOMPATAN PRESTASI YANG SANGAT LUAR BIASA, MENINGAT PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA, KABUPATEN KUNINGAN SEMPAT TERPURUK DAN DIGANJAR OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP).

KEMBALINYA OPINI WTP INI MENUNJUKKAN ADANYA KOMITMEN, KERJA KERAS, DAN PERBAIKAN SISTEMATIS DALAM TATA KELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. FRAKSI KAMI MEMANDANG BAHWA PEMULIHAN OPINI INI MEMBUKTIKAN FUNGSI KOORDINASI DAN KONSOLIDASI INTERNAL EKSEKUTIF

BERJALAN DENGAN BAIK. NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI AMANAT RESTORASI MENGINGATKAN DENGAN TEGAS BAHWA OPINI WTP BUKANLAH JAMINAN MUTLAK BAHWA PELAKSANAAN ANGGARAN DI LAPANGAN TELAH BEBAS DARI INEFISIENSI, KEBOCORAN, ATAU SALAH SASARAN. WTP ADALAH STANDAR KEPATUHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN. OLEH KARENA ITU, TANTANGAN RIIL BERIKUTNYA ADALAH BAGAIMANA MENYELARASKAN KESEMPURNAAN ADMINISTRATIF INI DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT SECARA NYATA DI LAPANGAN.

SAUDARAKU KAKAK PIMPINAN DAN SELURUH HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

PADA MOMENTUM YANG BERBAHAGIA INI, FRAKSI AMANAT RESTORASI MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BHAYANGKARA KE-80 KEPADA SELURUH JAJARAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG JATUH PADA TANGGAL 1 JULI 2026.

TERIMA KASIH ATAS PENGABDIAN, DEDIKASI, DAN KERJA KERAS DALAM MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KEDAMAIAN BANGSA. TERUSLAH MENJADI PELINDUNG, PENGAYOM, DAN PELAYAN MASYARAKAT YANG PROFESIONAL, MODERN, DAN TERPERCAYA.

SAUDARAKU KAKAK PIMPINAN DAN SELURUH HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

MEMASUKI RANAH REALISASI ANGGARAN, FRAKSI AMANAT RESTORASI MEMBERIKAN CATATAN KRITIS YANG SANGAT MENDALAM TERHADAP PERFORMA PENDAPATAN DAERAH. PAD TAHUN ANGGARAN 2025 DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 2.825.095.691.730,00, NAMUN HANYA MAMPU TEREALISASI SEBESAR RP. 2.641.478.075.841,00 ATAU MENCAPAI 93,50%. DARI ANGKA TERSEBUT, SOROTAN TAJAM FRAKSI KAMI TERTUJU PADA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG HANYA MENCAPAI RP. 379.880.122.607,00 ATAU 79,30% DARI TARGET YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 479.049.942.113,00. KEGAGALAN MENCAPAI TARGET PAD HINGGA MINUS HAMPIR 21% INI MERUPAKAN INDIKASI KUAT LEMAHNYA FUNGSI PERENCANAAN (PLANNING) DAN PENGAWASAN (CONTROLLING) DI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENGAMPU PAD. PENJELASAN EKSEKUTIF

MENGENAI ADANYA PENURUNAN TRANSFER PUSAT DI AKHIR TAHUN TIDAK BOLEH DIJADIKAN KAMBING HITAM TUNGGAL UNTUK MENUTUPI KETIDAK MAMPUAN DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI DOMESTIK DAERAH. BERIKUT KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN DIBAWAH INI:

A. SEKTOR PAJAK DAERAH

MESKIPUN SECARA AKUMULATIF PENDAPATAN PAJAK DAERAH TEREALISASI SEBESAR RP. 206.740.087.067,00 ATAU 87,84% DARI TARGET RP. 235.353.291.920,00, FRAKSI KAMI MENCATAT ADANYA KETIMPANGAN PERFORMA ANTARJENIS PAJAK. KAMI MENGAPRESIASI PENCAPAIAN PAJAK REKLAME (100,75%), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (100,16%), SERTA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) YANG MENCAPAI 101,21%. KEBERHASILAN PADA TIGA JENIS PAJAK INI MENUNJUKKAN BAHWA INSTRUMEN PENGAWASAN DI SEKTOR TERSEBUT MULAI BERJALAN EFEKTIF. NAMUN, PERTANYAAN MENDASAR DARI FRAKSI AMANAT RESTORASI ADALAH MENGAPA TOTAL REALISASI PAJAK DAERAH SECARA KESELURUHAN MASIH TERTAHAN DI ANGKA 87,84%? SISA JENIS PAJAK LAINNYA DIPASTIKAN MENGALAMI PENURUNAN PERFORMA YANG CUKUP DRASTIS. PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN TERPERINCI MENGENAI KENDALA LAPANGAN DAN LANGKAH KONKRET APA YANG AKAN DIAMBIL UNTUK MELAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK PADA TAHUN BERJALAN.

B. FASE PENYESUAIAN RETRIBUSI DAERAH

FRAKSI AMANAT RESTORASI MEMANDANG KINERJA RETRIBUSI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2025 BERADA PADA ZONA MENGHAWATIRKAN. DARI TARGET YANG DICANANGKAN SEBESAR RP.214.168.071.922,00, REALISASINYA HANYA MENYENTUH ANGKA RP. 145.129.338.536,00 ATAU HANYA 67,76%. JIKA KITA BEDAH LEBIH MENDALAM, KONDISI INI MENCERMINKAN KESUKSESAN YANG TERTUNDA DARI MANAJERIAL YANG SISTEMIK:

1. **CATATAN TERHADAP RETRIBUSI JASA USAHA:** FRAKSI KAMI MEMANDANG SEKTOR INI MENGALAMI PENURUNAN, DI MANA REALISASINYA HANYA MENCAPAI RP. 3.599.899.111,00 DARI TARGET FANTASTIS YANG DIPATOK SEBESAR RP. 26.033.109.665,00, ATAU **HANYA 13,83% !** FRAKSI KAMI MENILAI PENENTUAN TARGET SEBESAR 26 MILIAR RUPIAH TANPA DIDUKUNG KAJIAN POTENSI YANG MATANG DAN REALISTIS ADALAH BENTUK KEGAGALAN DALAM PERENCANAAN (OVER-OPTIMISTIC BUDGETING). LEBIH IRONIS LAGI, RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG MENJADI BAGIAN DARI SEKTOR INI

MENCATATKAN PERSENTASE PENCAPAIAN TERENDAH, YAITU HANYA SEBESAR **9,89%** DARI TARGET RP. 23.640.961.665,00. BAGAIMANA MUNGKIN ASET-ASET KEKAYAAN DAERAH YANG BERNILAI TINGGI TERBIARKAN TIDAK MENGHASILKAN SECARA OPTIMAL? KAMI MENYARANKAN DILAKUKANNYA AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP TATA KELOLA PEMANFAATAN ASET DAERAH.

2. **BERKENAAN DENGAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU:** KAMI MENILAI CAPAIAN PADA SEKTOR INI JUGA SANGAT RENDAH, YAKNI HANYA TEREALISASI SEBESAR RP. 2.341.516.484,00 ATAU **24,26%** DARI TARGET SEBESAR RP. 9.650.840.900,00. DI DALAMNYA, RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) HANYA TEREALISASI SEBESAR RP. 2.161.823.694,00 ATAU **22,76%** DARI TARGET RP. 9.500.000.000,00. RENDAHNYA REALISASI PBG INI BERBANDING TERBALIK DENGAN PESATNYA PERTUMBUHAN FISIK BANGUNAN DI KABUPATEN KUNINGAN. FRAKSI AMANAT RESTORASI MENILAI ADANYA KEBOCORAN ADMINISTRATIF, LAMBATNYA PROSES PELAYANAN PERIZINAN, ATAU KETIDAKPATUHAN REGULASI YANG DIBIARKAN TANPA SANKSI TEGAS.

NAMUN DI SISI LAIN KAMI MENGAPRESIASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN MENCAPAI 101,05% DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (119,13%) , TETAPI SECARA NOMINAL NILAINYA TERLALU KECIL UNTUK MAMPU MENYELAMATKAN KETERPURUKAN TOTAL RETRIBUSI DAERAH. KAMI MEMBUTUHKAN KOMITMEN KONKRET EKSEKUTIF UNTUK MELAKUKAN DIGITALISASI SISTEM PENARIKAN RETRIBUSI DEMI MEMINIMALISIR HUMAN ERROR DAN POTENSI KEBOCORAN.

C. LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAN TATA KELOLA BLUD

PADA KOMPONEN LAIN-LAIN PAD YANG SAH, TEREALISASI SEBESAR RP. 21.343.646.363,00 ATAU **93,36%** DARI TARGET RP. 22.861.527.620,00. FRAKSI KAMI MENYOROTI TINGGINYA PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH (400,24%) DAN DENDA PAJAK DAERAH (234,57%). ANGKA DENDA YANG MELONJAK TINGGI INI DI SATU SISI MENAMBAH PENDAPATAN, NAMUN DI SISI LAIN MENCERMINKAN RENDAHNYA TINGKAT KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI AKIBAT KURANGNYA SOSIALISASI SERTA PEMBINAAN DARI INSTRUMEN TERKAIT.

CATATAN PENTING LAINNYA ADALAH MENGENAI PENDAPATAN BLUD DARI JASA LAYANAN YANG DIKELOLA LANGSUNG TANPA MELALUI KAS DAERAH. FRAKSI AMANAT RESTORASI MENINGATKAN AGAR FLEKSIBILITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD INI DIIMBANGI DENGAN PENGAWASAN YANG SUPER KETAT. AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA NON-KAS DAERAH INI HARUS TETAP TRANSPARAN DAN BERORIENTASI PENUH PADA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, BUKAN JUSTRU MEMBEBANI MASYARAKAT DENGAN BIAYA LAYANAN YANG MAHAL.

SAUDARAKU KAKAK BUPATI, PIMPINAN DAN SELURUH HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

PERLU KAMI SAMPAIKAN EVALUASI KRITIS PENGGUNAAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PADA TAHUN ANGGARAN 2025 DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 2.919.364.965.517,00 DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 2.696.635.464.866,00 ATAU 92,37%. DARI STRUKTUR REALISASI BELANJA INI, FRAKSI AMANAT RESTORASI MENEMUKAN ADANYA KETIDAKSEIMBANGAN POSTUR ANGGARAN YANG KURANG DITERIMA NALAR KEADILAN PUBLIK.

KOMPOSISI BELANJA OPERASI MENDOMINASI PORSI PENGELUARAN SECARA EKSTREM, YAKNI MENCAPAI RP. 2.019.993.286.637,00 (90,44% DARI PAGU). DI DALAM BELANJA OPERASI TERSEBUT, **BELANJA PEGAWAI** MENYEDOT DANA SEBESAR RP. 1.306.448.630.259,00 ATAU 94,92% DARI TARGETNYA. INI BERARTI, HAMPIR SEPARUH DARI TOTAL BELANJA DAERAH HABIS HANYA UNTUK MEMBAYAR GAJI DAN TUNJANGAN APARATUR (BAIK ASN MAUPUN NON-ASN).

KONDISI INI BERBANDING TERBALIK DENGAN PORSI **BELANJA MODAL** YANG HANYA DIANGGARKAN SEBESAR RP. 181.386.032.117,00 DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 172.324.375.972,00 (95,00%). RASIO BELANJA MODAL YANG TIDAK SAMPAI 7% DARI TOTAL REALISASI APBD INI SANGAT MEMPRIHATINKAN. BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PERBAIKAN JALAN-JALAN RUSAK, PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG MEMADAI, JIKA PORSI ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK LANGSUNG SANGAT MINIM? STRUKTUR ANGGARAN SEPERTI INI ADALAH STRUKTUR ANGGARAN YANG KONSUMTIF, BUKAN PRODUKTIF. FRAKSI AMANAT RESTORASI MENDESAK REFORMASI BIROKRASI DAN RASIONALISASI BELANJA PEGAWAI PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG DEMI MENINGKATKAN RUANG FISKAL BAGI BELANJA MODAL.

KAMI JUGA MEMPERTANYAKAN EFEKTIVITAS BELANJA BUNGA SEBESAR RP. 2.035.703.046,00 YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR BUNGA PINJAMAN

DAERAH KEPADA BANK BJB KUNINGAN. PINJAMAN DAERAH YANG DIAMBIL HARUS DIPASTIKAN MENGHASILKAN DAMPAK MULTIPLIKASI EKONOMI (ECONOMIC MULTIPLIER EFFECT) BAGI MASYARAKAT, BUKAN JUSTRU MENJADI BEBAN TETAP YANG MENGURAS APBD TANPA OUTPUT PEMBANGUNAN YANG JELAS.

SAUDARAKU KAKAK BUPATI, PIMPINAN DAN SELURUH HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

BERKAITAN DENGAN ATAS TINGGINYA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) FRAKSI AMANAT RESTORASI MEMBERIKAN CATATAN KHUSUS MENGENAI NILAI SILPA TAHUN ANGGARAN 2025 YANG RELATIF BESAR. BERDASARKAN NOTA PENGANTAR EKSEKUTIF, SILPA TERSEBUT DIKLAIM BERASAL DARI BELANJA YANG BERSIFAT TERIKAT, SEPERTI SISA DANA BLUD, DAU BIDANG PENDIDIKAN, DAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) YANG BARU DITRANSFER OLEH PEMERINTAH PUSAT DI AKHIR TAHUN.

MESKIPUN FRAKSI KAMI MEMAHAMI ARGUMENTASI TEKNIS TERSEBUT, NAMUN DARI SUDUT PANDANG MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, SILPA YANG BESAR—TERLEPAS DARI SUMBER DANANYA—TETAP MENCERMINKAN ADANYA HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PROGRAM DI LAPANGAN. KETERLAMBATAN PENYERAPAN DANA DAU PENDIDIKAN DAN BOKB HINGGA AKHIR TAHUN MENUNJUKKAN LEMAHNYA KOORDINASI DAN LOBI INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN TERKAIT, SERTA LAMBANNYA PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DI TINGKAT DAERAH. AKIBATNYA, MASYARAKAT DIRUGIKAN KARENA HAK MEREKA UNTUK MENERIMA MANFAAT DARI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KB MENJADI TERTUNDA. FRAKSI KAMI MEMINTA KOMITMEN EKSEKUTIF UNTUK MEMPERBAIKI TIMELINE PELAKSANAAN KEGIATAN AGAR PENYERAPAN ANGGARAN DAPAT BERJALAN PROPORSIONAL SEJAK KUARTAL PERTAMA.

SEBAGAI PERWUJUDAN FUNGSI PENGAWASAN YANG KONSTRUKTIF, FRAKSI AMANAT RESTORASI TIDAK HANYA MENYAMPAIKAN KRITIK, NAMUN JUGA MENAWARKAN POIN-POIN REKOMENDASI STRATEGIS SEBAGAI BERIKUT:

1. **MENGENAI RESTRUKTURISASI TARGET PENDAPATAN:** FRAKSI KAMI MENGHIMBAU TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) UNTUK MEROMBAK TOTAL METODOLOGI PENYUSUNAN TARGET PAD, KHUSUSNYA RETRIBUSI DAERAH. TARGET HARUS BERBASIS PADA DATA

EMPIRIS DAN KAJIAN ILMIAH, BUKAN SEKADAR MEMATOK ANGKA TINGGI DEMI MENYEIMBANGKAN DOKUMEN RANCANGAN ANGGARAN DI ATAS KERTAS.

2. **FRAKSI KAMI MEMOHON AUDIT PEMANFAATAN ASET AGAR** DILAKUKAN SECARA MENYELURUH DAN INVENTARISASI ULANG TERHADAP SELURUH ASET DAERAH, KHUSUSNYA YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI "ASET IDLE" AGAR DAPAT DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK KETIGA SECARA TRANSPARAN GUNA MENDONGKRAK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG SAAT INI TERPURUK DI ANGKA 9,89%.
3. **DIGITALISASI TERINTEGRASI:** KAMI MENDORONG PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM E-RETRIBUSI DAN E-TAX PADA SELURUH LINI PELAYANAN PUBLIK, TERUTAMA PADA SEKTOR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENUTUP CELAH KEBOCORAN ANGGARAN SECARA PERMANEN.
4. **TERKAIT EFISIENSI BELANJA OPERASI** FRAKSI AMANAT RESTORASI MENGUSULKAN AGAR MELAKUKAN MORATORIUM PENAMBAHAN PEGAWAI NON-ASN YANG TIDAK MENDESAK SERTA MELAKUKAN EFISIENSI KETAT TERHADAP BELANJA BARANG DAN JASA GUNA MENGGESER PORSI ANGGARAN MENUJU BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR PADA APBD BERIKUTNYA.
5. **MEMASTIKAN IMPLEMENTASI KARTU KREDIT** PEMERINTAH DAERAH (KKPD) BENAR-BENAR MAMPU MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN KECEPATAN BAYAR OPERASIONAL, SERTA MENCEGAH POTENSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DEMIKIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT RESTORASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 KAMI SAMPAIKAN. KRITIK, CATATAN, DAN REKOMENDASI YANG KAMI PAPARKAN MERUPAKAN BENTUK TANGGUNG JAWAB MORAL DAN KONSTITUSIONAL KAMI SEBAGAI PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT KUNINGAN DEMI TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERKEADILAN SOSIAL.

DENGAN MEMOHON RIDHO ALLAH SWT, FRAKSI AMANAT RESTORASI MENYATAKAN DAPAT MENERIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI UNTUK

DIBAHAS LEBIH LANJUT PADA TINGKAT KOMISI DAN PANITIA KHUSUS SESUAI DENGAN MEKANISME PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

**KUNINGAN, 03 JULI 2026
FRAKSI AMANAT RESTORASI
DPRD KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA


H. UBA SUBARI



SEKRETARIS


Hj. LIN YULYANTI, S.E.